

Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024: Studi di Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo

Gafar Tomutu

Universitas Bina Taruna Gorontalo

E-mail: gafartomutu510@gmail.com

Ellys Rachman

Universitas Bina Taruna Gorontalo

E-mail: ellysrachman12@gmail.com

Tety Thalib

Universitas Bina Taruna Gorontalo

E-mail: tetythalib72@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the level of community participation and the factors that influence it in the 2024 General Election in Tabongo Subdistrict, Gorontalo Regency. Voter participation is a crucial indicator in measuring the quality of democracy, yet the voter turnout in this area was recorded at only 79.43% of the total Permanent Voter List (DPT) of 13,704 individuals. This figure highlights serious challenges in the implementation of local democratic processes. The research uses a descriptive qualitative approach, with data collected through observation, in-depth interviews, and documentation. The findings reveal that low participation is influenced by several key factors, namely limited political knowledge among citizens, economic constraints that lead to vote buying practices, political apathy stemming from disappointment with elected representatives, and social pressure from local elites. Additionally, the role of electoral bodies in providing effective voter education remains inadequate, causing many citizens to vote irrationally or abstain altogether. These findings suggest the need for a more comprehensive approach to increase voter participation through enhanced political education, economic empowerment, and the restoration of public trust in the electoral process and its outcomes.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat partisipasi masyarakat dan faktor-faktor yang memengaruhinya dalam Pemilu 2024 di Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo. Partisipasi pemilih merupakan indikator krusial dalam mengukur kualitas demokrasi, namun partisipasi pemilih di wilayah ini tercatat hanya 79,43% dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang berjumlah 13.704 orang. Angka ini menyoroti tantangan serius dalam pelaksanaan proses demokrasi lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa rendahnya partisipasi dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci, yaitu keterbatasan pengetahuan politik warga negara, kendala ekonomi yang memicu praktik jual beli suara, apatisme politik akibat kekecewaan terhadap wakil rakyat terpilih, dan tekanan sosial dari elit lokal. Selain itu, peran lembaga penyelenggara pemilu dalam memberikan pendidikan pemilih yang efektif masih kurang memadai, sehingga banyak warga negara yang memilih secara tidak rasional atau bahkan tidak memilih sama sekali. Temuan ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif untuk meningkatkan partisipasi pemilih melalui peningkatan pendidikan politik, pemberdayaan ekonomi, dan pemulihan kepercayaan publik terhadap proses pemilu dan hasilnya.

Keywords : *Political Participation, 2024 Election, Local Politics, Apathy, Money Politics, Tabongo*

Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara demokratis terbesar di dunia, yang menjalankan sistem pemerintahan berdasarkan kedaulatan rakyat. Dalam konteks demokrasi, pemilihan umum (pemilu) menjadi instrumen penting yang menjamin partisipasi warga negara dalam menentukan arah kebijakan publik dan kepemimpinan nasional maupun lokal. Pemilu yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil tidak hanya menjadi mekanisme konstitusional, tetapi juga menjadi barometer keberhasilan demokrasi itu sendiri. Oleh karena itu, tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu sering kali dijadikan indikator penting dalam menilai kualitas demokrasi suatu negara. Di Indonesia, pelaksanaan pemilu telah berlangsung secara berkala dan serentak sejak era reformasi, namun tidak semua wilayah menunjukkan angka partisipasi yang menggembirakan. Salah satu wilayah yang menunjukkan kecenderungan rendah dalam partisipasi pemilu adalah Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo. Dalam Pemilu 2024, meskipun data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gorontalo menunjukkan bahwa rata-rata partisipasi masyarakat di kabupaten tersebut berada di kisaran 85–90%, tetapi partisipasi masyarakat di Kecamatan Tabongo hanya mencapai 79,43% dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 13.704 orang (KPU, 2024).

Rendahnya partisipasi ini menimbulkan kekhawatiran terhadap legitimasi pemerintahan lokal dan efektivitas representasi politik yang terbentuk melalui pemilu. Hal ini juga mencerminkan adanya tantangan mendasar yang dihadapi dalam mendorong keterlibatan aktif warga negara dalam proses demokrasi (Wulandari, 2022). Sejumlah faktor yang memengaruhi rendahnya partisipasi pemilih di Kecamatan Tabongo di antaranya adalah rendahnya pendidikan politik, pengaruh ekonomi dalam pengambilan keputusan politik, serta meningkatnya sikap apatis masyarakat terhadap proses dan aktor politik. Pendidikan politik merupakan elemen penting dalam membentuk kesadaran politik masyarakat. Menurut (Aditya & Fitriani, 2022), rendahnya tingkat pendidikan politik dapat menyebabkan masyarakat memilih secara tidak rasional, berdasarkan pengaruh keluarga, tokoh masyarakat, atau bahkan sekadar ikut-ikutan. Hal ini mengakibatkan munculnya partisipasi semu, di mana warga hanya terlibat secara formal dalam pemilu, tetapi tidak memiliki pemahaman mendalam terhadap substansi pilihan politiknya. Di Kecamatan Tabongo, fenomena ini terlihat jelas dalam wawancara dan observasi lapangan, di mana sebagian besar pemilih tidak mengenal visi-misi maupun latar belakang calon yang mereka pilih (Nugraha & Lestari, 2021). Selain pendidikan politik, kondisi ekonomi juga menjadi determinan penting dalam perilaku pemilih. Di wilayah dengan tingkat kesejahteraan yang rendah, politik uang atau vote buying masih menjadi praktik yang lazim. Banyak masyarakat yang dengan mudah tergoda oleh tawaran uang tunai atau bantuan barang dari calon legislatif, tanpa mempertimbangkan integritas dan kompetensi calon tersebut. Menurut (Hasibuan, 2022), praktik politik uang menjadi ancaman serius bagi demokrasi karena merusak integritas pemilu dan menghasilkan representasi politik yang tidak berkualitas. Di Kecamatan Tabongo, kondisi ekonomi sebagian masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan membuat mereka lebih rentan terhadap praktik tersebut. Pemilu akhirnya dipersepsikan bukan sebagai momentum untuk perubahan, tetapi sebagai peluang ekonomi sesaat yang bisa dimanfaatkan.

Sikap apatis masyarakat terhadap pemilu juga menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan. Apatisme politik ini umumnya muncul akibat kekecewaan masyarakat terhadap para calon atau wakil rakyat yang dianggap tidak menepati janji. Banyak masyarakat menyampaikan bahwa selama masa kampanye, para calon begitu aktif menjanjikan perubahan dan perbaikan, namun setelah terpilih mereka menghilang dan tidak pernah kembali menjalin komunikasi dengan konstituen. Hal ini menimbulkan rasa tidak percaya, bahkan sinisme terhadap proses pemilu secara keseluruhan. Survei Lembaga Survei Indonesia (2023) menunjukkan bahwa 34% pemilih muda merasa pemilu tidak berdampak langsung terhadap hidup mereka, sehingga memilih untuk tidak berpartisipasi. Sikap serupa juga ditemui di Kecamatan Tabongo, di mana masyarakat menganggap pemilu hanya sebagai formalitas lima tahunan yang tidak membawa perubahan signifikan dalam kehidupan mereka sehari-hari (Siregar, 2022). Di sisi lain, struktur politik lokal yang masih didominasi oleh elite tertentu juga menjadi penghambat keterlibatan masyarakat secara luas. Di beberapa desa di Kecamatan Tabongo, keputusan politik masih dipengaruhi oleh tokoh-tokoh berpengaruh atau kepala desa yang memiliki hubungan erat dengan partai atau calon tertentu (Kartika & Ramadhan, 2021). Akibatnya, masyarakat yang tidak berada dalam lingkaran kekuasaan tersebut merasa tidak memiliki suara atau posisi dalam proses politik. Ini menimbulkan perasaan marginalisasi yang berujung pada penarikan diri dari proses pemilu. (Rosdiana & Azhari, 2023) menjelaskan bahwa dominasi elite lokal sering kali menghambat demokratisasi di tingkat akar rumput karena mempersempit ruang partisipasi publik yang adil dan setara. Dalam kasus Tabongo, pengaruh tokoh lokal juga kerap dimanfaatkan untuk mengarahkan suara masyarakat ke calon tertentu, tanpa adanya ruang diskusi yang terbuka mengenai kualitas dan program calon yang bersangkutan (Pratama, 2023).

Institusi penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu seharusnya memainkan peran sentral dalam memberikan pendidikan politik dan memastikan proses pemilu berjalan dengan jujur dan adil. Namun dalam kenyataannya, upaya sosialisasi dan pendidikan pemilih di Kecamatan Tabongo belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat, terutama di desa-desa yang terpencil. Masih banyak warga yang tidak memahami fungsi legislatif, prosedur pencoblosan, dan pentingnya keterlibatan dalam pemilu. Hal ini diperparah dengan minimnya akses terhadap informasi yang akurat dan bebas hoaks. Menurut (Aprilia & Nugroho, 2023) efektivitas sosialisasi pemilu sangat ditentukan oleh pendekatan yang kontekstual dan partisipatif, bukan sekadar penyuluhan formal yang tidak melibatkan dialog dua arah. Di Tabongo, pendekatan seperti ini masih jarang dilakukan, sehingga pemahaman masyarakat terhadap pemilu pun tidak berkembang (Sahbana, 2023).

Penelitian mengenai partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2024 di Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo menemukan berbagai faktor yang memengaruhi keterlibatan politik warga, mulai dari rendahnya literasi politik hingga dominasi elite lokal. Temuan ini sejalan dengan hasil studi (Pilomonu et al., 2023) yang mengungkapkan bahwa persepsi masyarakat terhadap partisipasi politik di Desa Masuru, Kabupaten Gorontalo Utara, sangat dipengaruhi oleh minimnya pengetahuan, rendahnya harapan terhadap hasil politik, serta evaluasi negatif terhadap dampak partisipasi. Keterkaitan ini menunjukkan bahwa apatisisme politik bukan fenomena yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari pola kekecewaan kolektif masyarakat terhadap proses dan hasil pemilu di berbagai daerah,

termasuk Tabongo. Selain itu, studi Gaib, Rachman, dan Modanggu (2023) menyoroti peran elite lokal dalam memengaruhi proses politik secara tidak netral, yang juga tercermin di Tabongo, di mana tekanan sosial dan arahan dari tokoh masyarakat menjadi penentu dalam pengambilan keputusan politik warga. Kondisi ini memperkuat dugaan bahwa demokrasi lokal masih menghadapi tantangan dari sisi struktur sosial yang hierarkis dan praktik politik yang elitis. Sementara itu, (Thalib et al., 2025) menekankan pentingnya kepemimpinan inklusif dan transformasional dalam menciptakan ruang partisipasi yang setara dan mendorong kepercayaan publik. Jika pendekatan kepemimpinan yang mengedepankan komunikasi terbuka dan kolaborasi diterapkan dalam konteks pendidikan politik dan pengelolaan pemilu di Tabongo, maka peluang peningkatan partisipasi politik berbasis kesadaran dapat terbuka lebih luas. Ketiga jurnal ini memberikan kerangka pemikiran yang saling melengkapi dalam memahami kompleksitas partisipasi masyarakat, serta menegaskan bahwa penguatan demokrasi lokal di Tabongo memerlukan perbaikan struktural, kultural, dan kepemimpinan yang partisipatif.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif (Sugiyono, 2020), yang bertujuan untuk menggambarkan dan memahami secara mendalam tentang partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum tahun 2024 di Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada makna, persepsi, dan pengalaman masyarakat terhadap proses pemilu, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dalam pendekatan ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan dan analisis data. Lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Tabongo yang terdiri dari sembilan desa, yaitu Ilomangga, Limehe Barat, Limehe Timur, Limehu, Moahudu, Motinelo, Tabongo Barat, Tabongo Timur, dan Teratai. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Kecamatan Tabongo menunjukkan angka partisipasi pemilu yang lebih rendah dibandingkan rata-rata kecamatan lain di Kabupaten Gorontalo, serta adanya dinamika sosial-politik yang cukup kompleks dalam pelaksanaan pemilu di wilayah tersebut.

Sumber data dalam penelitian ini terbagi atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci yang terdiri dari Camat Tabongo, kepala desa dari masing-masing desa, dan warga masyarakat yang memiliki hak pilih serta berpartisipasi atau tidak berpartisipasi dalam Pemilu 2024. Total jumlah informan dalam penelitian ini adalah 15 orang yang dipilih secara purposif, yaitu dipilih berdasarkan pertimbangan siapa saja yang dinilai paling memahami isu partisipasi pemilu. Selain wawancara, data primer juga diperoleh melalui observasi langsung di lapangan terhadap kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan pemilu, serta dokumentasi visual dan catatan-catatan lapangan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi seperti laporan KPU Kabupaten Gorontalo, data statistik partisipasi pemilu tahun 2024, serta referensi pustaka terkait yang relevan dari jurnal ilmiah, buku, maupun berita daring yang kredibel.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga teknik utama, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara langsung terhadap

fenomena di masyarakat, terutama interaksi sosial dan respons masyarakat terhadap proses pemilu. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, agar memungkinkan peneliti mengeksplorasi lebih dalam pandangan dan pengalaman informan mengenai pemilu, partisipasi politik, serta kendala yang mereka hadapi. Sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi data melalui pengumpulan dokumen-dokumen resmi maupun arsip pendukung lainnya. Proses pengumpulan data dilakukan secara fleksibel dan terus menerus hingga informasi yang diperoleh dianggap cukup dan tidak ada lagi data baru yang muncul (data saturation).

Analisis data dalam penelitian ini mengacu pada model interaktif dari Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahap utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Pada tahap reduksi data, peneliti melakukan proses seleksi dan penyederhanaan informasi yang telah dikumpulkan dari lapangan. Informasi yang dianggap penting dikategorikan sesuai dengan fokus penelitian, yaitu faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi pemilih. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi, kutipan-kutipan penting, serta deskripsi temuan yang merefleksikan kondisi riil di lapangan. Pada tahap terakhir, peneliti melakukan penarikan kesimpulan secara induktif berdasarkan pola, hubungan, atau kecenderungan yang muncul dari data yang telah disajikan. Validitas data diuji melalui teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari berbagai informan dan data pendukung lainnya untuk memastikan konsistensi dan keabsahan temuan.

Dengan menggunakan metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran komprehensif tentang realitas partisipasi masyarakat dalam pemilu di Kecamatan Tabongo. Penelitian ini tidak hanya menggambarkan seberapa besar keterlibatan masyarakat dalam menggunakan hak pilih, tetapi juga mengungkap berbagai dimensi yang mempengaruhi sikap, keputusan, dan perilaku politik masyarakat dalam konteks lokal. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan penelitian untuk menghasilkan pemahaman mendalam yang dapat digunakan sebagai dasar perumusan kebijakan publik dalam mendorong peningkatan partisipasi pemilih pada pemilu mendatang.

Faktor Pengetahuan Politik Masyarakat

Pengetahuan politik merupakan salah satu prasyarat utama dalam mewujudkan partisipasi masyarakat yang berkualitas dalam pemilu. Dalam konteks demokrasi, partisipasi tidak hanya dipahami sebagai kehadiran fisik di Tempat Pemungutan Suara (TPS), tetapi juga mencakup sejauh mana masyarakat memahami, menyadari, dan mempertimbangkan hak dan kewajiban politiknya secara rasional dan independen. Pengetahuan politik melibatkan pemahaman tentang sistem pemerintahan, fungsi lembaga-lembaga politik, hak pilih warga negara, serta informasi mengenai calon yang akan dipilih. Tanpa adanya pengetahuan yang cukup, partisipasi yang dilakukan masyarakat cenderung menjadi simbolik dan bersifat pasif, bahkan dapat dengan mudah dimanfaatkan oleh kekuatan politik tertentu.

Hasil penelitian di Kecamatan Tabongo menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan politik masyarakat secara umum masih tergolong rendah. Ketika dilakukan wawancara dengan beberapa informan, baik dari kalangan pemilih pemula, orang tua, hingga tokoh masyarakat, banyak di antara

mereka yang tidak mengetahui siapa saja calon legislatif yang ada di surat suara, bahkan tidak memahami fungsi dan wewenang lembaga-lembaga yang hendak mereka pilih, seperti DPR RI, DPRD, atau DPD. Sebagian besar masyarakat hanya mengandalkan informasi dari keluarga, tetangga, atau tokoh lokal tanpa melakukan pengecekan sendiri terhadap profil dan program para calon. Fenomena ini mengindikasikan adanya kesenjangan informasi yang cukup besar di tingkat akar rumput.

Salah satu pemilih pemula dari Desa Limehe Timur mengaku bahwa ia memilih calon berdasarkan arahan dari kakaknya, karena dirinya sama sekali tidak mengenal siapa pun yang maju sebagai caleg. Ia tidak pernah mengikuti sosialisasi dari KPU atau diskusi politik di desa. Informasi yang ia miliki terbatas pada baliho yang terpampang di jalan atau selebaran yang dibagikan secara acak. Di desa lain seperti Teratai, seorang ibu rumah tangga menyatakan bahwa ia memilih calon yang sama dengan yang dipilih suaminya. Alasannya sederhana: ia tidak ingin repot berpikir dan merasa semua calon juga sama saja. Kasus-kasus ini menggambarkan realitas sosial yang menunjukkan bahwa banyak warga masih memilih secara emosional, impulsif, bahkan pragmatis tanpa dasar informasi yang kuat. Minimnya pengetahuan politik ini disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, tidak optimalnya kegiatan pendidikan politik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu maupun pemerintah desa. Sosialisasi yang dilakukan KPU di kecamatan Tabongo hanya menysasar segelintir kelompok masyarakat tertentu dan lebih berfokus pada aspek teknis pelaksanaan pemilu, seperti cara mencoblos, jadwal pemungutan suara, dan prosedur penggunaan surat suara. Aspek substansial seperti mengenal calon, memahami peran lembaga legislatif, serta pentingnya memilih berdasarkan pertimbangan rasional tidak disampaikan secara mendalam. Akibatnya, masyarakat tidak memiliki bekal informasi yang memadai dalam menentukan pilihannya. Kedua, rendahnya tingkat pendidikan formal masyarakat turut mempengaruhi kemampuan mereka dalam mengakses dan memahami informasi politik. Sebagian besar masyarakat Tabongo hanya menyelesaikan pendidikan dasar, dan memiliki keterbatasan dalam membaca informasi yang bersifat formal atau berbahasa teknis. Dalam kondisi seperti ini, masyarakat lebih mudah menerima informasi yang bersifat lisan atau visual, seperti percakapan antar warga, arahan tokoh masyarakat, atau informasi dari media sosial yang tidak selalu akurat. Hal ini berisiko memperbesar pengaruh disinformasi dan propaganda politik yang bisa membelokkan preferensi pemilih ke arah yang tidak sesuai dengan kepentingan rasional mereka. Ketiga, kurangnya akses terhadap sumber informasi yang kredibel juga memperparah keterbatasan pengetahuan politik. Di beberapa desa, akses internet masih terbatas, dan tidak semua warga memiliki televisi atau perangkat komunikasi lain yang dapat menghubungkan mereka dengan informasi politik yang lebih luas. Sementara itu, media lokal yang tersedia lebih banyak menyoroti aspek hiburan atau isu nasional, tanpa memberikan porsi yang cukup untuk membahas dinamika pemilu di tingkat daerah. Akibatnya, masyarakat kehilangan kesempatan untuk mengenal calon secara objektif dan mendalam.

Temuan ini diperkuat oleh hasil penelitian Fitriani dan Aditya (2022), yang menekankan bahwa partisipasi politik masyarakat di daerah-daerah perdesaan sering kali tidak didukung oleh kemampuan literasi politik yang memadai. Tanpa pembinaan yang terstruktur, pemilih cenderung menjadi sasaran empuk mobilisasi politik oleh elite lokal, dan tidak dapat memposisikan diri secara kritis dalam proses

demokrasi. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat merusak kualitas demokrasi, karena yang terpilih bukanlah mereka yang paling layak atau kompeten, melainkan mereka yang paling mampu memobilisasi dukungan secara pragmatis. Oleh karena itu, penting untuk mendorong peningkatan kapasitas politik masyarakat melalui pendekatan yang berkelanjutan dan kontekstual. Pendidikan politik tidak cukup dilakukan menjelang pemilu, tetapi harus menjadi bagian dari pembinaan masyarakat sepanjang waktu. Pemerintah daerah, penyelenggara pemilu, tokoh agama, dan tokoh adat perlu dilibatkan secara aktif dalam menciptakan ruang-ruang dialog yang membuka kesempatan bagi warga untuk berdiskusi tentang isu-isu politik dan pemerintahan. Program-program seperti diskusi warga, sekolah demokrasi desa, atau forum warga yang melibatkan anak muda dan perempuan dapat menjadi alternatif strategis dalam membangun budaya politik yang sehat dan sadar.

Peningkatan pengetahuan politik juga memerlukan inovasi dalam penyampaian materi. Penggunaan media lokal, radio komunitas, video pendek berbahasa daerah, serta konten-konten edukatif di media sosial yang mudah dipahami bisa menjadi cara efektif dalam menyampaikan pesan politik yang substansial. Kolaborasi antar lembaga, seperti KPU, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat sipil, juga penting untuk memperluas jangkauan pendidikan politik ke wilayah yang selama ini belum tersentuh.

Kesimpulannya, rendahnya pengetahuan politik masyarakat Kecamatan Tabongo menjadi tantangan serius dalam mewujudkan pemilu yang demokratis dan berkualitas. Partisipasi politik yang ideal seharusnya lahir dari kesadaran, bukan paksaan atau iming-iming. Oleh karena itu, penguatan literasi politik merupakan jalan strategis yang harus diambil semua pihak yang peduli terhadap masa depan demokrasi lokal.

Pengaruh Faktor Ekonomi terhadap Pilihan Politik

Aspek ekonomi masyarakat merupakan salah satu variabel yang sangat berpengaruh dalam menentukan perilaku politik, terutama dalam konteks pemilihan umum. Di banyak wilayah Indonesia, termasuk Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo, kondisi sosial ekonomi warga masih menjadi faktor dominan dalam membentuk sikap politik, terutama dalam hal pemberian suara. Pemilih yang berada dalam tekanan ekonomi cenderung memandang pemilu bukan sebagai sarana penyaluran aspirasi politik, melainkan sebagai peluang untuk mendapatkan manfaat materi sesaat. Dalam kondisi ini, partisipasi politik yang seharusnya mencerminkan kesadaran dan tanggung jawab sebagai warga negara, justru bergeser menjadi praktik transaksional.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan sejumlah warga di berbagai desa di Kecamatan Tabongo, ditemukan bahwa banyak pemilih mengakui pernah menerima uang, sembako, atau janji bantuan ekonomi dari tim sukses calon legislatif menjelang hari pemungutan suara. Praktik *vote buying* atau politik uang ini dilakukan secara langsung maupun terselubung. Ada yang menerima dalam bentuk uang tunai sebelum pencoblosan, ada pula yang diberikan setelah pemilu, dengan catatan bahwa warga tersebut memberikan dukungan kepada calon tertentu. Di Desa Motinelo, salah seorang warga mengaku menerima bantuan berupa bahan kebutuhan pokok senilai sekitar Rp150.000, yang

kemudian dibarengi dengan permintaan dukungan suara. Meskipun tidak ada pemaksaan secara eksplisit, namun pemberian tersebut disertai dengan harapan agar warga merasa berutang budi. Hal serupa juga terjadi di Desa Tabongo Timur, di mana praktik politik uang menjadi semacam "tradisi tak tertulis" dalam setiap gelaran pemilu. Warga menganggap bahwa bantuan dari calon legislatif adalah sesuatu yang wajar dan bahkan seharusnya terjadi. Mereka mengaitkan hal ini dengan anggapan bahwa para caleg memiliki dana kampanye besar, sehingga pemberian kepada pemilih menjadi bentuk timbal balik. Pandangan ini sangat berbahaya, karena dapat menormalisasi praktik politik yang menyimpang dan merusak integritas demokrasi. Ketika suara rakyat dapat dibeli, maka esensi pemilu sebagai mekanisme demokratis untuk memilih pemimpin yang terbaik menjadi sirna.

Faktor ekonomi ini memiliki akar yang kuat dalam kondisi sosial masyarakat setempat. Sebagian besar warga Kecamatan Tabongo bekerja sebagai petani, nelayan, atau buruh harian dengan penghasilan tidak tetap. Keterbatasan ekonomi membuat mereka lebih rentan terhadap bujukan materi dari calon. Dalam situasi kebutuhan dasar yang belum terpenuhi secara stabil, tawaran uang menjelang pemilu tentu menjadi hal yang menggairakan. Bagi sebagian warga, mendapatkan uang Rp100.000 menjelang hari pencoblosan bisa berarti pemenuhan kebutuhan rumah tangga untuk beberapa hari ke depan. Logika ekonomi semacam ini sering kali mengalahkan kesadaran politik yang ideal.

Penelitian Hasibuan (2022) juga menyebutkan bahwa di daerah dengan indeks kemiskinan tinggi, praktik politik uang lebih masif terjadi. Ia menambahkan bahwa calon legislatif cenderung memanfaatkan celah ini untuk memperoleh dukungan, karena biaya kampanye yang tinggi tidak selalu dibarengi dengan strategi politik berbasis gagasan. Maka jalan pintas berupa pemberian uang menjadi strategi praktis meski tidak etis. Dalam jangka panjang, hal ini menciptakan lingkaran setan di mana masyarakat terus bergantung pada pemberian sesaat, sementara calon legislatif yang terpilih tidak merasa berkewajiban untuk merealisasikan janji kampanye secara substansial. Fakta menarik lainnya adalah bahwa sebagian masyarakat sebenarnya menyadari bahwa praktik semacam ini salah secara hukum dan moral. Namun, dalam wawancara, banyak dari mereka mengungkapkan dilema antara idealisme dan kebutuhan hidup. Mereka tahu bahwa memilih berdasarkan uang bukanlah tindakan yang benar, tetapi dalam kondisi ekonomi yang sulit, pilihan rasional berubah menjadi pilihan pragmatis. "Kami tahu ini salah, tapi mau bagaimana lagi, kami juga butuh makan," begitu ujar seorang ibu rumah tangga di Desa Ilomangga. Ini menandakan bahwa penyelesaian terhadap persoalan partisipasi pragmatis tidak bisa hanya dilakukan melalui pendekatan hukum, tetapi harus juga melalui pendekatan struktural berupa penguatan kesejahteraan masyarakat. Selain kepada warga biasa, tim sukses juga kerap menyalurkan dana kampanye kepada tokoh masyarakat setempat agar bisa memobilisasi dukungan dalam jumlah besar. Kepala dusun, ketua RT, bahkan pengurus kelompok tani menjadi sasaran untuk menyebarkan pengaruh dan menjamin suara. Dalam praktiknya, tokoh-tokoh ini sering diberi "amplop khusus" agar mereka mendorong warga di lingkungannya memilih calon tertentu. Jika ini terjadi secara luas, maka pemilu bukan lagi menjadi ajang pertarungan gagasan, melainkan pertarungan kekuatan finansial semata.

Dalam konteks ini, pendidikan politik tidak cukup untuk mengubah perilaku pemilih jika tidak diiringi dengan penguatan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, strategi peningkatan kualitas pemilu harus dilakukan secara multidimensi. Pemerintah daerah perlu menghadirkan program-program pemberdayaan ekonomi di desa, baik dalam bentuk pelatihan, akses modal usaha, maupun perlindungan sosial yang berkelanjutan. Ketika masyarakat tidak lagi berada dalam kondisi ekonomi yang tertekan, maka mereka akan lebih mampu bersikap independen dan rasional dalam mengambil keputusan politik. Di sisi lain, peran lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu harus lebih tegas dalam menindak praktik politik uang. Pengawasan yang ketat di lapangan, pelibatan masyarakat dalam pelaporan pelanggaran, serta transparansi dalam proses kampanye dapat menjadi upaya preventif terhadap penyalahgunaan kekuatan uang. Kampanye antikorupsi dan anti vote buying harus dilakukan secara masif dan dikemas dalam bentuk yang mudah dipahami oleh masyarakat desa.

Kesimpulannya, pengaruh faktor ekonomi terhadap pilihan politik masyarakat Kecamatan Tabongo sangat signifikan. Kemiskinan tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi, tetapi juga memperlemah daya kritis masyarakat dalam menghadapi proses demokrasi. Tanpa intervensi yang menyeluruh dan berkelanjutan, maka partisipasi politik akan terus berlangsung dalam bentuk yang pragmatis, transaksional, dan jauh dari nilai-nilai demokrasi yang sehat. Pemilu sejatinya adalah momentum perubahan, bukan arena jual beli suara. Oleh karena itu, ke depan perlu ada upaya serius dari semua pihak untuk membangun kesadaran, kemandirian, dan ketahanan ekonomi masyarakat sebagai fondasi partisipasi politik yang berkualitas.

Sikap Apatisme dan Kepercayaan Publik terhadap Proses Politik

Sikap apatis dalam konteks politik merupakan bentuk ketidakpedulian atau penarikan diri masyarakat dari aktivitas politik, termasuk pemilu. Dalam demokrasi, apatisme politik menjadi tantangan serius karena dapat menggerus legitimasi pemerintahan serta melemahkan fondasi keterlibatan publik dalam pengambilan keputusan politik. Penelitian ini menemukan bahwa apatisme merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2024 di Kecamatan Tabongo. Apatisme politik tidak muncul dalam ruang hampa, melainkan sebagai respons terhadap pengalaman sosial dan politik yang dirasakan oleh masyarakat selama ini.

Banyak warga yang menyatakan kekecewaan mereka terhadap hasil-hasil pemilu sebelumnya. Menurut mereka, pemilu hanya menjadi ritual lima tahunan yang tidak memberikan perubahan berarti dalam kehidupan sehari-hari. Janji-janji politik yang disampaikan para calon selama masa kampanye kerap tidak ditepati setelah mereka terpilih. Ketika masyarakat tidak melihat hasil konkret dari partisipasi politik mereka, maka rasa percaya terhadap proses pemilu pun menurun. Dalam wawancara dengan warga di Desa Limehu dan Teratai, muncul ungkapan seperti “semua calon sama saja,” atau “kalau sudah duduk, mereka lupa masyarakat.” Ungkapan ini mencerminkan perasaan ditinggalkan dan dikhianati oleh para wakil rakyat yang dipilih sebelumnya.

Salah satu kasus nyata yang mencerminkan rendahnya kepercayaan terhadap proses politik terjadi di TPS di Desa Limehe Timur, di mana dari total 234 pemilih yang terdaftar, hanya sekitar 160

orang yang datang ke TPS. Sebagian besar yang tidak datang adalah warga usia produktif yang merasa tidak ada gunanya mengikuti pemilu. Mereka lebih memilih bekerja atau melakukan aktivitas lain ketimbang mencoblos. Bahkan beberapa warga secara terbuka menyatakan bahwa mereka sengaja tidak memilih sebagai bentuk protes terhadap sistem yang dianggap korup dan tidak berpihak kepada rakyat kecil. Temuan ini diperkuat oleh riset Yusuf dan Marbun (2023), yang menyebutkan bahwa apatisisme politik sering kali berakar dari ketidakpercayaan terhadap aktor politik dan lembaga penyelenggara negara. Ketika masyarakat merasa bahwa suara mereka tidak dihargai atau tidak menghasilkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik, maka mereka cenderung menarik diri dari proses politik. Apatisme juga dapat disebabkan oleh persepsi bahwa sistem politik sudah “diatur” atau penuh dengan kecurangan, sehingga partisipasi mereka dianggap sia-sia.

Faktor lain yang memperkuat sikap apatis adalah kurangnya komunikasi politik antara wakil rakyat dan konstituen setelah pemilu. Di banyak desa di Kecamatan Tabongo, masyarakat menyatakan bahwa setelah calon terpilih menjadi anggota DPRD, mereka tidak pernah lagi turun ke desa atau berkomunikasi dengan warga. Aspirasi masyarakat tidak pernah ditindaklanjuti, dan ruang diskusi politik pun tidak tersedia. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara warga dengan para pemimpinnya, sehingga memperkuat anggapan bahwa pemilu hanyalah formalitas untuk memenuhi syarat demokrasi, bukan sebagai alat perjuangan rakyat.

Situasi semacam ini dapat menjadi ancaman jangka panjang terhadap keberlanjutan demokrasi. Ketika apatisisme politik berkembang luas, maka akan muncul dominasi kelompok-kelompok tertentu yang mampu memobilisasi suara melalui pendekatan pragmatis atau manipulatif. Masyarakat yang apatis cenderung membiarkan kekuatan politik berjalan tanpa pengawasan, yang pada akhirnya membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi. Demokrasi akan kehilangan maknanya jika rakyat tidak lagi percaya bahwa suara mereka bisa membawa perubahan. Namun demikian, perlu dicatat bahwa apatisisme tidak selalu identik dengan ketidakpedulian total. Dalam beberapa kasus, apatisisme justru merupakan bentuk ekspresi kritis terhadap sistem yang tidak adil. Sejumlah warga yang memilih untuk tidak datang ke TPS melakukannya secara sadar sebagai bentuk protes terhadap sistem politik yang menurut mereka sarat dengan kepentingan pribadi dan manipulasi. Ini adalah bentuk apatisisme aktif yang menunjukkan bahwa masyarakat sebenarnya memiliki kesadaran politik, namun kecewa terhadap implementasi demokrasi yang mereka saksikan.

Untuk mengatasi sikap apatis ini, perlu dilakukan upaya serius dalam membangun kembali kepercayaan publik terhadap proses dan hasil pemilu. Salah satu langkah krusial adalah memperkuat akuntabilitas wakil rakyat pasca pemilu. Wakil rakyat yang telah terpilih harus aktif menjalin komunikasi dengan masyarakat, menyerap aspirasi, dan menyampaikan laporan kerja secara terbuka. Dengan begitu, masyarakat merasa bahwa suara mereka benar-benar dihargai dan berkontribusi terhadap pengambilan kebijakan. Selain itu, pendidikan politik harus diarahkan tidak hanya kepada pemilih pemula, tetapi juga kepada kelompok dewasa yang selama ini merasa lelah atau jenuh terhadap politik. Program edukasi yang menggunakan pendekatan kultural dan lokal, seperti diskusi warga berbasis kelompok tani, pengajian, atau forum pemuda, dapat menjadi sarana efektif untuk

menghidupkan kembali semangat partisipatif di masyarakat. Pemerintah daerah, penyelenggara pemilu, dan tokoh masyarakat harus bersinergi dalam membangun kesadaran kolektif bahwa politik adalah ruang perjuangan bersama, bukan milik segelintir elite.

Media massa dan media sosial juga dapat berperan penting dalam mereduksi sikap apatisisme politik. Konten-konten yang menampilkan keberhasilan wakil rakyat dalam mengawal kebijakan publik, atau testimoni warga yang merasakan manfaat dari kebijakan berbasis suara rakyat, dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat lainnya. Narasi-narasi positif ini perlu ditampilkan secara konsisten untuk melawan narasi pesimistik yang selama ini mendominasi persepsi publik.

Dengan demikian, sikap apatis masyarakat terhadap pemilu di Kecamatan Tabongo bukan semata-mata disebabkan oleh ketidaktahuan atau kemalasan, tetapi merupakan refleksi dari akumulasi kekecewaan, ketidakpercayaan, dan pengalaman buruk terhadap sistem politik yang tidak akuntabel. Untuk itu, membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi harus menjadi prioritas bersama. Tanpa kepercayaan, tidak akan ada partisipasi yang sehat. Dan tanpa partisipasi, demokrasi hanya akan menjadi prosedur kosong tanpa substansi.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo, dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan rata-rata partisipasi pemilih di wilayah Kabupaten Gorontalo. Tingkat partisipasi yang tercatat sebesar 79,43% menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara harapan terhadap demokrasi partisipatif dengan kenyataan di lapangan. Rendahnya angka ini tidak hanya mencerminkan masalah teknis semata, tetapi berkaitan erat dengan berbagai faktor sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang saling memengaruhi.

Pertama, rendahnya tingkat pengetahuan politik masyarakat menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi kualitas partisipasi dalam pemilu. Banyak warga belum memahami secara menyeluruh fungsi pemilu, peran lembaga legislatif, serta pentingnya memilih secara rasional berdasarkan informasi yang benar. Pendidikan politik yang belum merata dan minimnya sosialisasi yang menyentuh substansi politik turut memperparah kondisi ini. Partisipasi yang terjadi sebagian besar bersifat formal dan tidak dilandasi oleh kesadaran politik yang kuat.

Kedua, kondisi ekonomi masyarakat yang relatif lemah membuka celah terjadinya praktik politik uang secara luas. Banyak pemilih yang memberikan suara karena iming-iming uang atau bantuan dari calon legislatif, bukan karena kualitas atau gagasan yang ditawarkan. Situasi ini menjadikan pemilu sebagai ruang transaksional, bukan arena kompetisi ide dan visi. Politik uang yang meluas di Kecamatan Tabongo telah menurunkan kualitas demokrasi karena suara rakyat menjadi mudah dimanipulasi oleh kekuatan finansial.

Ketiga, sikap apatis yang berkembang di tengah masyarakat juga menjadi penyebab menurunnya partisipasi. Kekecewaan terhadap wakil rakyat yang tidak menepati janji serta lemahnya komunikasi antara legislator dengan konstituen menyebabkan hilangnya kepercayaan publik terhadap proses politik. Banyak warga yang memilih untuk tidak datang ke TPS sebagai bentuk protes atau ketidakpercayaan terhadap efektivitas pemilu sebagai instrumen perubahan. Apatisme politik ini menunjukkan adanya krisis legitimasi dalam sistem demokrasi di tingkat lokal.

Secara umum, partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2024 di Kecamatan Tabongo dipengaruhi oleh interaksi kompleks antara tingkat pengetahuan politik, kondisi ekonomi, kepercayaan terhadap sistem politik, serta dinamika sosial yang ada di lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan partisipasi tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan pendekatan komprehensif yang menyentuh semua dimensi kehidupan warga. Partisipasi yang sejati hanya akan tumbuh ketika masyarakat merasa memiliki ruang yang bebas, informasi yang cukup, serta keyakinan bahwa suara mereka membawa perubahan nyata.

REFERENSI

- Aditya, R., & Fitriani, L. (2022). Pendidikan Politik di Pedesaan: Upaya Meningkatkan Partisipasi Pemilih. *Jurnal Politik Dan Masyarakat*, 7(1), 45–57.
- Aprilia, D., & Nugroho, A. (2023). Efektivitas Sosialisasi Pemilu di Tingkat Desa: Studi Kasus di Kecamatan Pagerwojo. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pemerintahan*, 5(2), 102–113.
- Hasibuan, M. (2022). Politik Uang dalam Pemilu Legislatif: Studi di Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Demokrasi Dan Etika Politik*, 4(1), 33–47.
- Kartika, Y., & Ramadhan, A. (2021). Kesenjangan Informasi dan Partisipasi Politik Masyarakat Desa. *Jurnal Informasi Publik*, 89–100.
- KPU. (2024). *Data Partisipasi Pemilu 2024*.
- Nugraha, R. D., & Lestari, A. (2021). Apatisme Politik dalam Demokrasi Lokal: Studi di Sumatera Utara. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 10(1), 20–31.
- Pilomonu, S. N., Rachman, E., & Talalu, M. A. (2023). Persepsi Masyarakat dalam Partisipasi Politik: Studi Kasus Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2019 di Desa Masuru Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo U. *Jurnal Administrasi Negara Dan Ilmu Pemerintahan*, 2(2), 20–31.
- Pratama, M. F. (2023). Tingkat Literasi Politik Masyarakat Pedesaan di Era Digital. *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Politik*, 6(1), 112–123.
- Rosdiana, L., & Azhari, H. (2023). Pengaruh Struktur Sosial terhadap Pilihan Politik Masyarakat di Daerah Pinggiran. *Jurnal Politik Rakyat*, 5(1), 54–68.
- Sahbana, R. (2023). Partisipasi Politik dan Pendidikan Demokrasi di Wilayah Perdesaan. *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan Publik*, 3(1), 39–51.
- Siregar, N. (2022). Partisipasi Semu dalam Pemilu Lokal: Studi Kasus di Kecamatan Siantar Barat. *Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah*, 39–51.
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. UNESCO Publishing.
- Thalib, T., Aneta, A., Ngiu, Z., & Abdussamad, J. (2025). Leadership transformation: Integrating feminine and masculine excellence in an era of inclusivity. *Journal of Asian Multicultural Research for Social Sciences Study*, 6(2), 44–49.
- Wulandari, S. (2022). Kinerja KPU dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pedesaan. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(2), 90–101.

